

EKONOMI

**Risma Nurhaini Munte, Mansur, Suharno, Sutrisno,
 Dessy Evianti, Krispina Fenanlampir, Tri Widayati,
 Posma Sariguna Johnson Kennedy, Nova Suryani,
 Arief Yanto Rukmana, Jeferson Tanesab,
 Delila Angelina Nahak Seran, Muhammad Yusuf,
 Muhammad Hatta, Fabiola Bulimasena Luturmas**



EKONOMI

Risma Nurhaini Munte

Mansur

Suharno

Sutrisno

Dessy Evianti

Krispina Fenanlampir

Tri Widayati

Posma Sariguna Johnson Kennedy

Nova Suryani

Arief Yanto Rukmana

Jeferson Tanesab

Delila Angelina Nahak Seran

Muhammad Yusuf

Muhammad Hatta

Fabiola Bulimasena Luturmas



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

EKONOMI

Penulis :

Risma Nurhaini Munte
Mansur
Suharno
Sutrisno
Dessy Evianti
Krispina Fenanlampir
Tri Widayati
Posma Sariguna Johnson Kennedy
Nova Suryani
Arief Yanto Rukmana
Jeferson Tanesab
Delila Anggelina Nahak Seran
Muhammad Yusuf
Muhammad Hatta
Fabiola Bulimasena Luturmas

ISBN : 978-623-198-437-1

Editor : Diana Purnama Sari, S.E., M.E

Penyunting : Ari Yanto, M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Ekonomi ini.

Buku Ini Membahas Pengantar bisnis, Sejarah pemikiran ekonomi, Ekonomi pembangunan, Perekonomian di Indonesia, Manajemen resiko dan analis kredit perbankan, Pengantar akuntansi, Teori ekonomi makro, Manajemen risiko dan analis kredit perbankan, Ekonomi public, Ekonomi koperasi dan kewirausahaan, Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, Ekonomi moneter, Evaluasi proyek pembangunan, Kebanksentralan, Ekonomi perencanaan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENGANTAR BISNIS	1
1.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Bisnis	1
1.2 Lingkungan Bisnis	4
1.2.1 Pihak-Pihak Dalam Pengelolaan Bisnis.....	4
1.2.2 Maksud dan Tujuan Bisnis.....	5
1.2.3 Tingkatan Partisipasi.....	6
1.4 Bentuk Kepemilikan Bisnis	11
1.5 Etika Bisnis	13
1.6 Sistem Perekonomian Dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis	15
1.7 Peluang Dan Trend Bisnis Masa Depan	15
DAFTAR PUSTAKA.....	20
BAB 2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI	21
2.1 Pendahuluan.....	21
2.2 Perkembangan Pemikiran Ekonomi dan Kontroversi.....	22
2.2.1 Kontroversi Teori Ekonomi.....	22
2.2.2 Tokoh-tokoh Pemikir Ekonomi	24
2.3 Pemikiran Ekonomi Pra-Klasik	27
2.3.1 Pemikiran-pemikiran Ekonomi Pra-Klasik.....	27
2.3.2 Pemikiran Ekonomi Markantilisme.....	29
2.3.3 Pemikiran Ekonomi Fisokrat.....	30
2.4 Pemikiran Ekonomi Klasik.....	31
2.4.1 Teori Adam Smith	31
2.4.2 Teori David Ricardo	31
2.4.3 Teori Thomas Robert Malthus.....	32
2.5 Ekonomi Sosial	33
2.5.1 Kritik Terhadap Pemikiran Ekonomi Klasik.....	34
2.5.2 Jhon Stuart Mill	35

2.5.3 Ekonomi Sosialis: Utopia dan Ilmiah	35
2.6 Pemikiran Ekonomi Neo-Klasik.....	38
2.6.1 Teori Utilitas Marginal – Karl Menger (Jerman, 1840-1921)	39
2.6.2 Teori Keseimbangan Umum – Leon Walras (Prancis, 1834-1930).....	40
2.6.3 Teori Titik Equilibrium - Alfred Marshall (Britania, 1842-1924)	40
2.6.4 Aliran Sejarah	41
DAFTAR PUSTAKA.....	44
BAB 3 EKONOMI PEMBANGUNAN	47
3.1 Pendahuluan.....	47
3.2 Teori Pembangunan Ekonomi	48
3.2.1 Mazhab Historismus.....	48
3.2.2 Mazhab Analitis	59
DAFTAR PUSTAKA.....	71
BAB 4 PEREKONOMIAN DI INDONESIA	73
4.1 Pendahuluan.....	73
4.2 Perekonomian Indonesia di Masa Lampau	74
4.2.1 Era Soekarno (1945-1967)	74
4.2.2 Era Pemerintahan Soeharto (1967-1998).....	75
4.2.3 Era B.J. Habibie (1998-1999).....	76
4.2.4 Era Abdurrahman Wahid (1999-2001).....	77
4.2.5 Era Megawati Soekarno Putri (2001-2004).....	77
4.2.6 Era Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).....	78
4.2.7 Era Joko Widodo (2014-sekarang)	79
DAFTAR PUSTAKA.....	83
BAB 5 MANAJEMEN RISIKO DAN ANALIS KREDIT PERBANKAN	85
5.1 Pendahuluan.....	85
5.2 Klasifikasi dan Kategori Risiko.....	89
5.3 Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko	92
5.4 Strategi dan Tahapan Dalam Melakukan Manajemen Risiko	94

5.5 Manajemen Risiko Perbankan	97
5.5.1 Manajemen Risiko Kredit	97
5.5.2 Manajemen Risiko Likuiditas	101
5.5.3 Manajemen Risiko Operasional	103
5.6 Analisis Kredit Perbankan.....	106
5.6.1 Penilaian dan Pengawasan Kredit.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	117
BAB 6 PENGANTAR AKUNTANSI	119
6.1 Pendahuluan.....	119
6.2 Pengertian Akuntansi.....	120
6.2.1 Tujuan Akuntansi	121
6.2.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi.....	121
6.3 Pengguna Informasi	123
6.4 Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum (<i>Generally Accepted Accounting Principles, GAAP</i>).....	125
6.5 Proses Akuntansi	125
6.6 Fungsi Akuntansi dalam Bisnis.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128
BAB 7 EKONOMI MAKRO	129
7.1 Pendahuluan.....	129
7.2 Isu Utama Dalam Analisis Makro Ekonomi	130
7.3 Masalah Utama Dalam Perekonomian	130
7.4 Kebijakan Makroekonomi	136
7.4.1 Kebijakan ekonomi fiskal.....	136
7.4.2 Kebijakan Moneter	139
7.4.3 Kebijakan Sisi Penawaran	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141
BAB 8 EKONOMI INTERNASIONAL: PENGARUH KEKUASAAN HEGEMONIK	143
8.1 Pendahuluan.....	143
8.2 Ekonomi Internasional dan Penting untuk Mempelajarinya	146
8.3 Pengaruh Kekuasaan Hegemonik terhadap Ekonomi dan Politik Internasional	149

8.4 Situasi Ekonomi Internasional 1919-1939.....	152
8.5 Situasi Ekonomi Internasional setelah Perang Dunia II..	155
8.6 Implikasi Kebijakan	158
8.7 Kesimpulan.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....	162
BAB 9 EKONOMI REGIONAL	165
9.1 Pendahuluan.....	165
9.2 Tujuan dan Manfaat Ekonomi Regional	168
9.3 Konsep Wilayah (Region) Dalam Ilmu Ekonomi Regional.....	169
9.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	172
9.5 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah.....	175
9.6 Teori Sektor (<i>Sector Theory of Growth</i>)	178
9.7 Struktur Industri dan Pertumbuhan Wilayah (<i>Industrial Structure and Regional Growth</i>)	179
DAFTAR PUSTAKA.....	180
BAB 10 EKONOMI KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN... 181	
10.1 Pendahuluan.....	181
10.2 Permasalahan Koperasi	182
10.3 Manajemen Koperasi	184
10.4 Kewirausahaan Koperasi	185
10.5 Klasifikasi Koperasi di Indonesia.....	189
10.5.1 Koperasi Konsumen	189
10.5.2 Koperasi Produsen	189
10.5.3 Koperasi Jasa.....	190
10.5.4 Koperasi Simpan Pinjam	190
10.5.5 Koperasi Serba Usaha	190
10.6 Kewirausahaan dan Pertumbuhan Ekonomi	190
10.7 Kewirausahaan Sebagai Inovator Pencipta Lapangan Pekerjaan.....	193
10.8 Ekosistem Kewirausahaan dalam mengembangkan kewirausahaan.....	194
10.9 Kesimpulan.....	195
DAFTAR PUSTAKA.....	197

BAB 11 EKONOMI KEPENDUDUKAN	203
11.1 Pendahuluan.....	203
11.2 Konsep Ekonomi Kependudukan.....	204
11.3 Fertilitas	205
11.4 Mortalitas.....	207
11.5 Migrasi	210
DAFTAR PUSTAKA.....	215
BAB 12 EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN	217
12.1 Pendahuluan.....	217
12.3 Evaluasi Proyek Pembangunan	219
12.3.1 Aspek Dalam Evaluasi Proyek Pembangunan.....	221
12.4 Aspek – Aspek Persiapan Dan Tahapan Evaluasi Proyek Pembangunan.....	221
12.4.1 Persiapan Evaluasi Proyek.....	221
12.4.2 Langkah-Langkah Penilaian Proyek.....	223
12.5 Lembaga yang membutuhkan Evaluasi Proyek.....	224
DAFTAR PUSTAKA.....	226
BAB 13 KEBANK SENTRALAN	227
13.1 Pendahuluan.....	227
13.2 Bank Sentral.....	227
13.2.1 Sejarah Bank Sentral.....	228
13.2.2 Fungsi, Tugas dan Peran Bank Sentral.....	229
13.3 Wewenang Bank Sentral	231
13.4 Kebijakan Moneter	232
13.5 Peran Bank Sentral Dalam Kestabilan Keuangan	234
DAFTAR PUSTAKA.....	238
BAB 14 KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN	239
14.1 Pendahuluan.....	239
14.2 Pengertian Perencanaan.....	239
14.3 Pengertian Pembangunan	241
14.4 Konsep Dasar Perencanaan	242
14.5 Pentingnya Perencanaan Pembangunan	247
14.6 Bagaimana melakukan perencanaan?	255

14.6 Jenis-jenis Perencanaan	257
14.7 Pendekatan Perencanaan Pembangunan.....	266
DAFTAR PUSTAKA.....	269
BAB 15 EKONOMI MARITIM.....	271
15.1 Pendahuluan.....	271
15.2 Ekonomi	271
15.3 Maritim	273
15.4 Ekonomi Maritim.....	274
15.4.1 Peranan Sektor Maritim	275
15.4.2 Manfaat Sektor Maritim.....	276
15.5 Sektor Pelayaran	277
15.5.1 Insfrastruktur Pelayaran.....	277
15.5.2 Industri Perkapalan	278
15.6 Pemberlakuan Asas Cabotage	278
DAFTAR PUSTAKA.....	281

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Pandangan Lama Hubungan Risiko dan Timbal Hasil	88
Gambar 5.2. Pandangan Baru : Risiko Harus Dikelola Secara Optimal	89
Gambar 5.3. Kategori Risiko	91
Gambar 5.4. Sumber Risiko Operasional	104
Gambar 7.1. Bentuk Umum Siklus Ekonomi.....	131
Gambar 14.1. Hubungan Perencanaan dan Pembangunan	242
Gambar 14.2. Keterkaitan PPN dan PPD.....	247
Gambar 14.3. Koordinasi Perencanaan	267

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tahap Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pra-Klasik.....	27
Tabel 3.1. Perkiraan Rostow masa tinggal landas di beberapa negara	55
Tabel 5.1. Pengukuran Rasio Likuiditas	111
Tabel 5.2. Pengukuran Rasio Leverage.....	111
Tabel 5.3. Pengukuran Rasio Aktivitas	112
Tabel 5.4. Pengukuran Rasio Rentabilitas.....	113
Tabel 5.5. Pengukuran Rasio Coverage	113

BAB 8

EKONOMI INTERNASIONAL: PENGARUH KEKUASAAN HEGEMONIK

Oleh Posma Sariguna Johnson Kennedy

8.1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang ruang lingkup dan pentingnya ekonomi internasional serta sejarahnya. Sejarah perdagangan internasional mencakup petualangan, kekhawatiran akan bahaya yang tak terduga, dan ketidakpastian. Namun, perdagangan internasional telah tumbuh pesat sejak Perang Dunia II, dimana banyak pembatasan perdagangan dihilangkan melalui negosiasi internasional seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*). GATT (UU-RI, 1994), “Merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.” WTO (Rosa, 2023) adalah, “Organisasi internasional yang menaungi upaya untuk perdagangan antar negara semakin terbuka. Tujuan dari WTO adalah untuk mengurangi bahkan meniadakan tarif serta nontarif dan hambatan perdagangan lainnya.”

Ekonomi Internasional, dinyatakan bahwa perdagangan internasional memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan kejutan serta bahaya yang tidak terduga. Sejak perjalanan karavan pada abad ke-10 hingga penjelajahan samudera pada abad ke-14 yang dipicu oleh peluang perdagangan, perdagangan internasional

terus berkembang dan membentuk sejarah dunia seperti revolusi Amerika Serikat yang dipicu oleh pembatasan perdagangan Inggris di koloni. Setelah Perang Dunia I, negara-negara di Eropa yang sebelumnya saling berperang mulai menandatangani perjanjian perdamaian sebagai upaya untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran yang kemudian menjadi cikal bakal Komunitas Eropa saat ini.

Sejak Perang Dunia II, dunia telah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam membebaskan perdagangan dari banyak bentuk pembatasan perdagangan melalui perundingan internasional seperti yang dilakukan dalam GATT dan, baru-baru ini, melalui pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pembatasan perdagangan yang kompetitif di masa lalu telah berhasil dihapuskan secara signifikan. Volume perdagangan internasional dunia telah berkembang pesat sejak Perang Dunia terakhir. Hal ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh penurunan biaya transportasi, revolusi dalam teknologi komunikasi, serta penurunan risiko karena adanya asuransi dan hukum perdagangan internasional. Namun, semua ini tidak akan berkontribusi banyak jika tidak ada revolusi dalam pemahaman bahwa perdagangan adalah mesin pertumbuhan dan kemakmuran, serta bahwa isolasionisme sudah usang. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk membuka diri dan bekerja sama dalam perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang berkelanjutan.

Dalam perdagangan internasional, terdapat perkembangan yang mengkhawatirkan. Perdagangan telah menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat di negara maju dan berkembang. Di antaranya adalah pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka karena barang-barang asing yang lebih murah, suatu harga yang harus dibayar dalam spesialisasi internasional dan alokasi faktor (dalam menghadapi mobilitas relatif buruk). Banyak pendukung perdagangan bebas mulai meragukan manfaat yang diakui dari perdagangan tanpa

hambatan. Para politisi yang khawatir akan konsekuensi dari kehilangan pekerjaan yang marah di daftar pemilih meningkatkan teriakan untuk proteksi. Masalah seperti negara besar vs. negara kecil, negara kaya vs. negara miskin muncul secara teratur, terutama terkait dengan pembagian keuntungan dari perdagangan bebas.

Apakah negara harus membuka ekonominya? Jika ya, bagaimana cara mereka, terutama yang miskin, mengatasi guncangan yang meluas dari seberang perbatasan (dan bukan kesalahan mereka sendiri)? Seberapa cepat harus dilakukan dan dalam urutan apa? Bagaimana hubungan keuangan internasional harus dilakukan? Apakah sebuah negara menyerahkan banyak otonomi dalam pelaksanaan kebijakan makroekonomi demi (atau untuk) tatanan global? Apakah ketergantungan internasional dapat diatur sedemikian rupa sehingga memastikan fungsinya yang lancar dan perkembangan yang adil dan harmonis? Jenis otoritas supranasional apa yang diperlukan oleh tatanan tersebut? Bagaimana urusan mereka akan dilakukan? Apakah hal ini akan mengarah pada jenis pemerintahan dunia? Jika ya, bagaimana bentuknya? Anda dapat memperkaya pengetahuan Anda tentang masalah-masalah ekonomi internasional yang kompleks ini. Namun, apa itu ekonomi internasional?

Bab ini juga ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi ekonomi internasional pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II serta bagaimana peran kekuatan hegemonik dalam menciptakan stabilitas dalam ekonomi internasional. Studi ini juga memberikan penekanan pada pentingnya memiliki kekuatan hegemonik yang kuat dan efektif dalam menciptakan stabilitas ekonomi internasional. Dalam konteks ini, peran Amerika sebagai kekuatan hegemonik pada masa setelah Perang Dunia II berakhir sangatlah penting. Ruang lingkup studi ini mencakup dua dekade sebelum Perang Dunia II (1919-1939) dan dua dekade setelah berakhirnya Perang Dunia II, dari tahun 1945 hingga 1965 dengan menekankan faktor-faktor

yang bertanggung jawab dan mempengaruhi situasi ekonomi internasional. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang terutama menggunakan data sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan sumber daya internet.

8.2 Ekonomi Internasional dan Penting untuk Mempelajarinya

(Dey, Harendra K, 2010)

Ilmu ekonomi internasional merupakan bidang studi yang membahas prinsip-prinsip ekonomi yang berkaitan dengan pertukaran barang (dan jasa) antara negara-negara berdaulat (atau lebih tepatnya, antara penduduk mereka) dan masalah-masalah kebijakan khusus yang timbul akibat hal ini. Namun, perlu dipahami bahwa prinsip-prinsip umum ini sama dengan prinsip-prinsip yang berlaku untuk perdagangan antar kelompok dan individu dalam suatu negara. Hal ini karena keuntungan dari perdagangan, baik nasional maupun internasional, muncul dari spesialisasi melalui pembagian kerja yang meningkatkan produktivitas faktor internasional. Namun, spesialisasi tidak mungkin terjadi tanpa perdagangan. Tentu saja, pertukaran yang saling menguntungkan bisa terjadi bahkan tanpa produksi, ketika selera berbeda antara mitra perdagangan. Keuntungan dari pertukaran murni ini dapat meningkat secara signifikan ketika perdagangan membuat realokasi sumber daya produktif berdasarkan keunggulan komparatif menjadi mungkin.

Lalu mengapa perlu mempelajari ilmu ekonomi internasional secara terpisah dari (misalnya) moneter dan perbankan atau ekonomi tenaga kerja? Setiap cabang tersebut memiliki kelompok transaksi yang spesifik. Demikian pula dengan ilmu ekonomi internasional - penduduk dari negara-negara yang berbeda. Secara tradisional, terdapat dua alasan yang mendasari pembelajaran terpisah dari ilmu ekonomi internasional.

1. Pertama, dalam jangka panjang, faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal bergerak bebas di dalam batas-batas nasional, sedangkan mobilitas mereka sangat dibatasi antara negara-negara. Sebagai hasilnya, faktor-faktor tersebut tidak dapat berpindah ke lokasi manapun untuk mengambil keuntungan dari imbalan yang lebih tinggi (yang mencerminkan produktivitas yang lebih tinggi). Namun kita tahu bahwa faktor-faktor tidak sepenuhnya tidak dapat bergerak antara negara. Migrasi internasional yang besar pada abad ke-19 adalah pengingat instan atas keberlawanan ini. Tenaga kerja terampil jauh lebih tidak terbatas. Juga tidak sepenuhnya benar bahwa faktor-faktor dapat bergerak mutlak bebas di dalam suatu negara, terutama ketika negara tersebut memiliki budaya dan kelompok etnis yang beragam. Namun demikian, faktor-faktor, terutama tenaga kerja tidak terampil dan semi-terampil, jauh lebih tidak terbatas (umumnya) antara negara-negara daripada dalam suatu negara tertentu. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk menanyakan apakah dan sejauh mana aliran bebas barang dan jasa antar negara dapat menggantikan ketidakmampuan relatif faktor dalam menyamakan imbalan faktor. Dengan kata lain, apakah perdagangan dapat menyebabkan realokasi internasional faktor dan karenanya meningkatkan tingkat pendapatan riil dan kesejahteraan dunia?
2. Kedua, yang perlu diperhatikan dalam studi ekonomi internasional adalah bahwa perdagangan internasional terjadi antara negara-negara yang berdaulat, dan karena itu, mungkin dan bahkan mungkin, bahwa dalam mengejar tujuan nasional yang saling bertentangan, mereka akan mengadopsi kebijakan yang akan, sengaja atau tidak sengaja, cenderung mengurangi arus perdagangan. Dalam konteks ini, tugas khusus teori perdagangan internasional adalah

untuk menyoroti keuntungan dari perdagangan bebas dan fokus pada kebutuhan dan kemungkinan harmoni dan konflik dalam hubungan ekonomi internasional.

Pembagian umum seluruh korpus teori ekonomi menjadi domain mikro dan makro memiliki paralel dalam ekonomi internasional. Ekonomi internasional terdiri dari dua cabang utama, yaitu perdagangan internasional dan keuangan internasional. Yang pertama sesuai dengan mitra mikroekonomi dan menggunakan metode teori keseimbangan statis untuk pertukaran barter dengan uang yang diasumsikan sebagai penghalang. Teori keuangan internasional, di sisi lain, pada dasarnya bersifat makroekonomi dan menangani hubungan moneter internasional yang memiliki arti khusus dalam keadaan ketidakseimbangan neraca pembayaran dan penyesuaian yang dibutuhkan.

Di dunia saat ini, interdependensi ekonomi antara negara-negara sangat kuat terutama dalam hal kebijakan makroekonomi. Misalnya, jika pendapatan nasional Amerika Serikat meningkat, mitra perdagangannya dapat memperoleh manfaat dari peningkatan impor warga negara AS. Namun, kebijakan dalam negeri AS juga dapat mengeksport inflasi atau pengangguran ke luar negeri. Pihak asing kemudian dapat mengambil tindakan balasan yang merugikan. Kebijakan merugikan seperti ini dapat berdampak buruk bagi semua pihak, sebagaimana sejarah membuktikannya. Oleh karena itu, kekuatan ekonomi ini perlu diatur.

Seperti yang telah ditekankan sebelumnya, perdagangan dapat menjadi mesin pertumbuhan, tetapi dapat juga menjadi bermasalah. Untuk perdagangan menjadi instrumen yang efektif bagi pertumbuhan dan stabilitas, kerangka kerja kerja sama dan pengendalian yang efektif harus dikembangkan. Tugasnya seringkali sulit karena masalah non-ekonomi cenderung memalingkan perhatian dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi internasional.

8.3 Pengaruh Kekuasaan Hegemonik terhadap Ekonomi dan Politik Internasional

Kekuasaan hegemonik diakui sebagai salah satu elemen penting dalam mempelajari dan menganalisis politik internasional dan ekonomi internasional. Kekuasaan hegemonik memainkan peran penting dalam ekonomi politik internasional. Studi ini mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh kekuasaan hegemonik selama periode sebelum dan setelah Perang Dunia II. Sejauh mana ketidakcocokan dalam situasi ekonomi antara kedua periode itu sangat dipengaruhi oleh kekuasaan hegemonik? Apa yang terjadi pada situasi ekonomi setelah Perang Dunia II tanpa kekuasaan hegemonik yang kuat dan efektif?

Teori Stabilitas Hegemonik diterapkan dalam studi ini. Teori ini penting dalam memahami peran yang dimainkan oleh kekuasaan hegemonik dan hubungannya dengan pengembangan ekonomi dan stabilitas politik negara lain dalam sistem internasional. Ide utama dari teori Stabilitas Hegemonik adalah bahwa harus ada sebuah hegemon (kekuasaan pemimpin), yaitu satu kekuatan dominan dan kuat dalam sistem internasional untuk memastikan stabilitas ekonomi dan politik internasional (Kindleberger, 1981, 1995; Webb & Krasner, 1989). Hanya kekuasaan hegemonik yang dapat menetapkan aturan internasional yang memfasilitasi pertukaran yang teratur antar negara dan harus menghukum pelanggar dengan hukuman yang dapat diprediksi. Institusi ekonomi internasional tidak dapat berjalan efektif tanpa kekuasaan hegemonik yang kuat (Yazid, 2007, 2015). Hukum dan regulasi dalam sebuah institusi internasional hanya akan efektif ketika kekuasaan hegemonik memainkan perannya dan bersedia untuk bertindak sebagai kekuasaan hegemonik (Gilpin, 2001; Kindleberger, 1973).

Peran dan pentingnya kekuasaan hegemonik dalam ekonomi dan politik internasional telah banyak dibahas oleh para

ahli hubungan internasional dan ekonomi politik internasional. Strange (1987) berpendapat bahwa gabungan empat elemen penting dalam menjelaskan kemunculan dan kelangsungan kekuasaan hegemonik. Keempat elemen tersebut adalah keamanan militer, produksi ekonomi, perdagangan keuangan, dan pengetahuan teknologi. Keempat elemen ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain serta digambarkan Strange (1987) sebagai sebuah piramida. Keempat elemen tersebut penting dalam membuat dan memberikan kontribusi pada kekuatan kekuasaan hegemonik.

Menurut Keohane (1984), untuk dianggap sebagai hegemonik dalam ekonomi politik dunia, sebuah negara harus memiliki akses ke bahan baku penting, mengontrol sumber modal utama, mempertahankan pasar besar untuk impor, dan memiliki keunggulan komparatif dalam barang dengan nilai tambah tinggi, menghasilkan upah dan keuntungan yang relatif tinggi. Negara tersebut harus lebih kuat dalam dimensi-dimensi ini secara keseluruhan daripada negara lain. Kriteria Keohane untuk kekuasaan hegemonik menekankan faktor-faktor yang terkait dengan ekonomi dan perdagangan.

Gilpin (2001) mendukung pentingnya kekuasaan hegemonik dalam ekonomi internasional. Dia berpendapat bahwa meskipun mungkin memungkinkan untuk menciptakan tatanan internasional liberal yang stabil, namun tanpa hegemon, hal ini tidak akan pernah terjadi. Bagi Gilpin, ekonomi internasional liberal memerlukan hegemon yang berkomitmen pada prinsip-prinsip ekonomi liberal, seperti yang dilakukan oleh Inggris pada abad kesembilan belas dan Amerika Serikat pada abad kedua puluh. Baldwin (1993) mendukung bahwa kekuasaan hegemonik diperlukan untuk stabilitas ekonomi internasional. Dia menulis bahwa peran hegemonik yang dimainkan oleh Amerika Serikat meningkatkan kesejahteraan ekonomi sebagian besar negara non-komunis. Strange (1987), Keohane (1984), Gilpin (2001) dan Baldwin (1993) memiliki argumen dasar yang sama bahwa

kekuasaan hegemonik memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi internasional.

Situasi ekonomi internasional selama periode 1919-1939 dan periode setelah 1945 sangatlah berbeda. Perbedaan situasi ini sangat berkaitan erat dengan peran yang dimainkan oleh kekuatan hegemonik dalam perekonomian internasional. Keadaan ekonomi yang tidak stabil selama periode dari 1919 hingga 1939 disebabkan oleh ketiadaan kekuatan hegemonik yang kuat dalam sistem internasional. Inggris tidak dapat berperan sebagai kekuatan hegemonik setelah Perang Dunia I karena ia sangat lemah secara ekonomi. Situasi ekonomi internasional yang lebih baik setelah akhir Perang Dunia II pada tahun 1945 sangat dipengaruhi oleh kekuatan hegemonik Amerika yang kuat. Pertumbuhan ekonomi positif Amerika Serikat selama periode antar-perang terutama sebelum tahun 1929 sangat mempengaruhi perannya dalam menciptakan posisi yang lebih baik dalam perekonomian dan politik setelah 1945. Stabilitas situasi ekonomi internasional hanya mungkin tercipta dengan adanya kekuatan hegemonik yang kuat. Tanpa kekuatan hegemonik yang kuat dan efektif, tidak mungkin menciptakan kondisi ekonomi internasional yang stabil.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara situasi ekonomi internasional pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia II (1939-1945). Masa antar perang dari tahun 1919 hingga 1939 ditandai dengan situasi ekonomi yang buruk akibat dampak negatif Perang Dunia I yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918. Pada masa ini, tidak terdapat kekuatan hegemonik yang efektif yang mampu mengatur dan menciptakan stabilitas dalam ekonomi internasional. Meskipun Inggris mencoba untuk memainkan peran sebagai kekuatan hegemonik, namun upaya tersebut tidak berhasil seperti sebelum Perang Dunia I.

Berbeda dengan situasi tersebut, setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, situasi ekonomi internasional berubah. Amerika yang menjadi kekuatan hegemonik pada masa itu mampu memainkan perannya dengan baik dan efektif dalam mengatur dan

menciptakan stabilitas dalam ekonomi internasional. Studi ini akan menganalisis peran yang dimainkan oleh kekuatan hegemonik dalam menciptakan stabilitas ekonomi internasional. Kekuatan hegemonik yang kuat dan efektif sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi internasional. Tanpa kekuatan hegemonik yang kuat, peraturan dan institusi ekonomi internasional yang baik tidak akan berarti apa-apa.

8.4 Situasi Ekonomi Internasional 1919-1939

(Yazid MN, 2020)

Dua dekade antara tahun 1919 hingga 1939 merupakan masa ketidakstabilan ekonomi di tingkat internasional. Tidak ada kekuatan hegemonik yang berperan selama periode tersebut. Inggris yang merupakan kekuatan hegemonik sebelum Perang Dunia I, 1914, terlalu lemah untuk berperan efektif seperti sebelumnya. Ekonomi Inggris sangat lemah setelah Perang Dunia I, 1918. Konflik antara Inggris (kekuatan hegemonik) dan Jerman (kekuatan kontra-hegemonik) selama empat tahun antara tahun 1914 hingga 1918 mengakibatkan situasi ekonomi yang buruk bagi kedua kekuatan tersebut.

Periode antara tahun 1919 hingga 1939 dapat dianggap sebagai "periode transisi" dalam menciptakan kekuatan hegemonik baru. Inggris sangat lemah secara ekonomi dan politik setelah tahun 1918 dan tidak dapat melanjutkan perannya sebagai kekuatan hegemonik (Cohn, 2008). Sejak tahun 1815 hingga 1914, Inggris merupakan kekuatan hegemonik yang efektif dan kuat. Jerman gagal menggantikan peran yang dimainkan oleh Inggris sebagai kekuatan hegemonik baru. Jerman tertekan dan dihukum berat di bawah Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Pada saat yang sama, Amerika Serikat menjadi lebih kuat dan dalam posisi yang lebih baik secara ekonomi, tetapi belum cukup kuat untuk mengambil peran sebagai kekuatan hegemonik (Nye & Welch, 2011). Kebijakan ekonomi tertutup Amerika Serikat membuka

jalan bagi dampak buruk pada ekonomi Eropa, terutama Inggris dan Prancis. Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya tidak dapat menjalankan dan meningkatkan ekonomi mereka pasca Perang Dunia I melalui perdagangan internasional, terutama dengan Amerika Serikat (dan negara-negara di bawah pengaruh Amerika Serikat) karena "kebijakan ekonomi tertutup" Amerika.

Hanya kekuatan hegemonik yang kuat yang dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan politik internasional. Institusi ekonomi dan organisasi regional atau internasional tidak dapat berjalan lancar dan efektif tanpa dukungan kuat dari kekuatan hegemonik yang kuat. Organisasi internasional, Liga Bangsa-Bangsa, dibentuk pada tahun 1919 dengan dukungan kuat dari Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson. Organisasi ini memiliki struktur, regulasi, dan tujuan yang baik. Tujuan utama adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik internasional dengan tujuan akhir adalah menghindari konflik besar di masa depan seperti yang terjadi dari tahun 1914 hingga 1918. Mengapa tujuan yang indah dan harmonis dari Liga Bangsa-Bangsa gagal? Jawabannya adalah ketiadaan kekuatan hegemonik yang kuat dalam mengelola dan mengatur sistem internasional.

Pada masa setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa didirikan sebagai sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di seluruh dunia. Namun, Amerika Serikat menolak untuk bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa setelah Senat Amerika menolak untuk mendukung Presiden Woodrow Wilson. Hal ini berdampak pada kinerja organisasi ini yang tidak dapat berjalan dengan lancar serta gagal mencapai tujuannya dalam menciptakan ekonomi yang makmur dan stabilitas politik internasional.

Organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa memerlukan adanya kekuatan yang kuat untuk memainkan peran sebagai kekuatan hegemonik. Namun, pada dua dekade setelah Perang Dunia I, Inggris dan Prancis tidak cukup kuat di bidang politik dan ekonomi untuk mendukung dan menjalankan Liga

Bangsa-Bangsa secara efektif. Faktor ekonomi juga sangat penting dalam mengelola sebuah organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa.

Inggris dan Prancis telah berusaha keras untuk mengelola Liga Bangsa-Bangsa, namun kedua negara tersebut sangat lemah secara ekonomi setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918. Kelemahan ekonomi kedua negara tersebut berdampak negatif terhadap keberhasilan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencapai stabilitas politik dan ekonomi internasional. Hal ini menjadi penyebab utama kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dan stabilitas ekonomi internasional pada tahun 1930-an. Ketika negara-negara agresif seperti Italia dan Jepang meluncurkan serangan terhadap negara lain, Inggris dan Prancis tidak dapat memberikan sanksi dan hukuman yang efektif kepada pelanggar prosedur Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun Pasal 16 dari Liga Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa "setiap perang yang mengabaikan prosedur Liga Bangsa-Bangsa akan dianggap sebagai perang terhadap semua anggota Liga Bangsa-Bangsa" (Nye & Welch, 2011). Namun anggota Liga Bangsa-Bangsa tidak dapat melakukan tindakan apa pun terhadap Jepang ketika ia menyerang Manchuria pada tahun 1931 atau terhadap Italia ketika ia menyerang Ethiopia pada tahun 1934. Hal ini terjadi karena posisi ekonomi dan militer kedua negara tersebut yang lemah, sehingga mekanisme sanksi tidak dapat dijalankan tanpa adanya kekuatan hegemonik yang kuat. Kekuatan hegemonik yang lemah gagal dalam mengelola dan mengelola sistem internasional yang kondusif dalam mencapai kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik internasional. Akhirnya, Perang Dunia II pecah selama sekitar lima tahun dari 1939 hingga 1945.

8.5 Situasi Ekonomi Internasional setelah Perang Dunia II

(Yazid MN, 2020)

Setelah Perang Dunia II, situasi ekonomi internasional mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan masa sebelum perang, terutama situasi pada tahun 1930-an. Pertumbuhan ekonomi internasional meningkat pesat sejak akhir tahun 1940-an hingga tahun 1950-an, 1960-an, dan awal tahun 1970-an. Perdagangan internasional, kerja sama internasional, dan investasi langsung asing meningkat pesat. Situasi ekonomi internasional yang lebih baik erat kaitannya dengan manajemen ekonomi internasional yang dipimpin oleh kekuatan hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya di Barat. Perencanaan ekonomi pasca-perang yang mendasar adalah Konferensi Bretton Woods yang diadakan pada bulan Juli 1944. Filosofi dasar dari tatanan ekonomi internasional baru adalah ekonomi liberal terbuka. Amerika Serikat menyadari bahwa kebijakan ekonomi yang tertutup berdasarkan perspektif Merkantilisme memberikan dampak buruk bagi ekonomi internasional. Tidak diragukan lagi bahwa Perang Dunia II yang terjadi dari tahun 1939 hingga 1945 disebabkan oleh masalah ekonomi negara-negara industri (Oatley, 2012). Serangan Jepang di Manchuria pada tahun 1931, Italia di Etiopia pada tahun 1934, dan keputusan Jerman menyerang Polandia pada tahun 1939 erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Untuk menghindari konflik di masa depan, Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terkuat setelah Perang Dunia II harus menjadi pemimpin dalam ekonomi internasional.

Konferensi Bretton Woods pada bulan Juli 1944 membentuk dua lembaga ekonomi internasional penting, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Bank Dunia) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Beberapa tahun kemudian (pada tahun 1947), Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) didirikan. Fungsi utama GATT adalah untuk

menjadi kerangka kerja di mana negara anggota melakukan putaran negosiasi perdagangan multilateral yang bertujuan untuk menyetujui pengurangan tarif. Ketiga lembaga ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi internasional pasca-perang. Ketiga lembaga ekonomi ini disebut Organisasi Institusi Ekonomi Kunci (KEIO). Ketiga lembaga ini memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi yang cepat, mendorong perdagangan internasional, dan pertumbuhan internasional yang positif (Cohn, 2008).

Setelah Perang Dunia II, situasi ekonomi internasional sangat berbeda dari periode sebelumnya, terutama pada tahun 1930-an. Pertumbuhan ekonomi internasional meningkat pesat sejak akhir 1940-an hingga tahun 1950-an, 1960-an, dan awal 1970-an. Perdagangan internasional, kerja sama internasional, dan investasi langsung asing meningkat dengan pesat. Situasi ekonomi internasional yang lebih baik erat kaitannya dengan pengelolaan ekonomi internasional yang dipimpin oleh kekuatan hegemonik Amerika dan sekutunya di Barat.

Konferensi Bretton Woods pada bulan Juli 1944 merupakan perencanaan ekonomi pasca-perang yang fundamental. Filosofi dasar dari tatanan ekonomi internasional baru adalah ekonomi liberal terbuka. Amerika Serikat menyadari bahwa kebijakan ekonomi tertutup berdasarkan perspektif Merkantilisme memberikan dampak buruk pada ekonomi internasional. Untuk menghindari konflik di masa depan, Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terkuat setelah Perang Dunia II harus menjadi pemimpin dalam ekonomi internasional.

Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 mendirikan dua institusi ekonomi internasional penting, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*World Bank*) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1947, dibentuk Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT). Ketiga institusi tersebut memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

internasional pasca-Perang Dunia II. Ketiga institusi ekonomi ini disebut Organisasi Institusi Ekonomi Kunci atau *Key Economics Institution Organizations* (KEIOs) dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi internasional.

Selain itu, Amerika Serikat juga menciptakan Kawasan Ekonomi Amerika dan kerja sama ekonomi regional. Di Eropa, Masyarakat Batubara dan Baja Eropa didirikan pada tahun 1957 dan menjadi Komunitas Ekonomi Eropa pada tahun 1957. Tujuan kerja sama ekonomi regional ini adalah untuk mengurangi hambatan pada semua bentuk interaksi ekonomi antara negara anggota, dan dengan demikian mempromosikan kerja sama yang lebih besar di antara anggota Komunitas Ekonomi Eropa. Amerika Serikat juga mendukung pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1967 dan bekerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan di kawasan Asia Timur Laut.

Selain itu, Amerika Serikat juga membentuk *American Economic Sphere* dan kerja sama ekonomi regional. Di Eropa, dibentuklah *European Coal and Steel Community* pada tahun 1957 yang kemudian menjadi *European Economic Community*. Tujuan kerja sama ekonomi regional ini adalah untuk mengurangi hambatan dalam bentuk apapun terhadap pertukaran ekonomi antar negara anggota, dan mempromosikan lebih banyak kerja sama di antara negara-negara anggota Eropa.

Di Asia Tenggara, Amerika Serikat mendukung pembentukan *Association of South-East Nations* (Asian ASEAN) pada tahun 1967 dan bekerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan di kawasan Asia Timur. Selain itu, Amerika Serikat juga menyediakan "public good" internasional ke kawasan ini untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan ekonomi. NATO di Eropa pada tahun 1949, SEATO di Asia Tenggara pada tahun 1954, dan perjanjian keamanan bilateral dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan pada awal tahun 1950-an merupakan contoh

"public good" yang disediakan oleh Amerika Serikat untuk daerah ekonominya.

Mengapa ketiga institusi tersebut efektif dan sangat berkontribusi pada stabilitas ekonomi internasional? Siapa yang berada di belakang pembentukan kerja sama ekonomi regional tersebut? Apakah mungkin institusi ekonomi internasional dan kerja sama ekonomi regional dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada situasi ekonomi yang lebih baik tanpa kekuatan hegemoni yang kuat? Jawabannya terletak pada keberadaan kekuatan hegemoni Amerika Serikat yang kuat setelah Perang Dunia II dan praktik kebijakan ekonomi liberal terbuka. Tanpa kekuatan hegemoni yang kuat, institusi ekonomi dan kerja sama ekonomi regional tidak dapat mencapai tujuannya. Tujuan yang baik dan regulasi yang harmonis membutuhkan kekuasaan politik untuk melaksanakannya.

8.6 Implikasi Kebijakan

Studi ini memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi negara kecil dan menengah dalam struktur internasional. Negara-negara tersebut harus menjalin hubungan yang baik dengan kekuatan hegemonik. Hubungan yang baik dengan kekuatan hegemonik penting dalam dua hal, yaitu:

1. Pertama, menciptakan struktur internasional yang stabil (dengan dukungan dan kerjasama dari jumlah negara yang lebih besar terhadap kekuatan hegemonik, stabilitas dapat tercipta lebih baik daripada dalam situasi di mana hanya sedikit negara yang bekerja sama dengan kekuatan hegemonik). Di sisi lain, kekuatan hegemonik juga harus mempraktikkan kebijakan ekonomi liberal terbuka. Struktur internasional dan sistem negara saling terkait satu sama lain. Kebijakan ekonomi tertutup Amerika pada periode sebelum Perang Dunia II membawa dampak buruk pada kondisi ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi tertutup

Amerika pada periode setelah Perang Dunia I hingga akhir Perang Dunia II memberikan dampak buruk pada seluruh struktur internasional. Tidak dapat disangkal bahwa Perang Dunia II pecah pada tahun 1939-1945 karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi sangat penting untuk stabilitas internasional.

2. Kedua, negara kecil dan menengah mendapatkan manfaat langsung dari kekuatan hegemonik dan sekutunya. Manfaat langsung dapat berupa hubungan perdagangan internasional, investasi langsung asing, dan aspek lain seperti bantuan ekonomi langsung dan dukungan moral dalam kegiatan ekonomi. Mustahil bagi negara kecil dan menengah dalam struktur internasional untuk mendapatkan investasi langsung, hubungan perdagangan yang baik, dan bantuan ekonomi lainnya tanpa hubungan yang baik dengan kekuatan hegemonik.

Perkembangan terakhir yang terjadi adalah terjadinya persaingan hegemoni antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik menimbulkan kekhawatiran akan berdampak pada perdagangan internasional, terutama di Indonesia. Perdagangan internasional Indonesia dapat terpengaruh oleh konflik antara negara-negara anggota Pakta Trilateral AUKUS (Australia, Inggris, Amerika Serikat) dan China akibat perang perdagangan dan situasi di Indo-Pasifik. Peningkatan kekuasaan nasional China telah memengaruhi aliran perdagangan internasional ke Indonesia dari masing-masing negara anggota AUKUS. Hal ini menunjukkan terdapat persaingan antara negara-negara anggota AUKUS dan China terkait kekuasaan nasional mereka. China terus meningkatkan kekuasaannya, yang mengurangi kekuasaan nasional negara lain, terutama Amerika Serikat. Namun kita berharap, persaingan dalam pengeluaran militer, konflik perang perdagangan antara Amerika Serikat dan

China, dan situasi di Indo-Pasifik tidak memengaruhi aliran perdagangan internasional dari masing-masing anggota AUKUS ke Indonesia. (Kennedy, 2023)

8.7 Kesimpulan

Studi ini membahas tentang pentingnya dan ruang lingkup ekonomi internasional. Sejak masa lalu, perdagangan internasional telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama setelah Perang Dunia II, yang berhasil membebaskan perdagangan dari banyak bentuk pembatasan perdagangan melalui negosiasi internasional seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan WTO (*World Trade Organization*). Namun, perdagangan internasional juga menimbulkan kecemasan dan frustrasi di kalangan masyarakat luas baik di negara maju maupun negara berkembang. Masalah seperti negara besar vs negara kecil, negara kaya vs negara miskin muncul secara teratur, terutama dalam hal pembagian keuntungan dari perdagangan bebas.

Studi ekonomi internasional membahas prinsip ekonomi yang mendasari pertukaran barang (dan jasa) antara negara-negara berdaulat (lebih tepatnya antara penduduknya) dan masalah kebijakan khusus yang timbul sebagai akibat dari hal tersebut. Prinsip-prinsip umum ini sama seperti yang berlaku untuk perdagangan antar kelompok dan individu dalam suatu negara. Studi ekonomi internasional berfokus pada aspek-aspek khusus yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti alokasi sumber daya produktif pada dasar keunggulan komparatif dan realokasi faktor internasional. Keterbatasan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal antar negara juga menjadi topik penting dalam studi ekonomi internasional.

Terdapat hubungan erat antara situasi ekonomi internasional, stabilitas politik internasional, dan peran hegemoni yang efektif. Situasi ekonomi internasional pada periode sebelum Perang Dunia II buruk karena politik internasional yang tidak

stabil. Pada masa itu, tidak ada kekuatan hegemonik yang kuat dan efektif untuk menjalankan dan mengendalikan situasi internasional. Inggris tidak cukup kuat untuk mengendalikan sistem internasional. Namun, situasinya berbeda setelah Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945.

Setelah Perang Dunia II, situasi ekonomi internasional mengalami perubahan signifikan. Pertumbuhan ekonomi internasional meningkat pesat sejak akhir tahun 1940-an hingga awal 1970-an, dan perdagangan internasional, kerja sama internasional, serta investasi langsung asing juga meningkat pesat. Situasi ekonomi internasional yang lebih baik erat kaitannya dengan manajemen ekonomi internasional yang dipimpin oleh kekuatan hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya di Barat. Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 membentuk tiga lembaga ekonomi internasional penting, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*Bank Dunia/World Bank*), Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund, IMF*), dan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*GATT*). Ketiga lembaga ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi internasional pasca-perang.

Ucapan Terima kasih

Kami berterima kasih kepada “Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pertahanan - Republik Indonesia (RIDU)” dan pihak-pihak lain yang telah membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, R. E. 1993. Adapting the GATT to a More Regionalized World: A Political Economy Perspectives. in Anderson, K. & Blackhurst, R. *Regional Integration and Global Trading System*. New York: St. Martin's Press.
- Cohn, T.H. 2008. *Global Political Economy: Theory and Practice*. Fourth edition. New York: Longman-Pearson.
- Dey, Harendra K. 2010. International Economics: Scope And Importance, IN International Trade and Finance. Publishing, Printing & Distribution Division (PPD), Bangladesh Open University, Gazipur-1705. Retrived from: https://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOB/MBA/m_ba_3316/Unit-01.pdf
- Gilpin, R. 2001. *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kennedy P.S.J., Sutrasna Y., Haetami. 2023. Does the Competition of Aukus Countries With China in The Indo-Pacific Affect Indonesia's International Trade? *Res Militaris*, vol.13, n°1, Winter-Spring.
- Keohane, R.O. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kindleberger, C.P. 1995. *The World Economy and National Finance in Historical Perspective*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Kindleberger, C.P. 1981. Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides. *International Studies Quarterly*, 25 (June).
- Kindleberger, C.P. 1973. *The World in Depression, 1929-1939*. Berkerly, CA: University of California Press.

- Nye, J.S. (jr.) & Welch, D.A. 2011. *Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory and History*. Eight edition. Boston: Longman-Pearson.
- Oatley, T. 2012. *International Political Economy*. Fifth edition. Boston: Longman-Pearson.
- Strange, S. 1987. The Persistent Myth of Lost Hegemony. *International Organization*, 41 (4), 259-274.
- Webb, M.C. & Krasner, S.D. 1989. Hegemonic Stability Theory: An Empirical Assessment. *Review of International Studies*, 15 (2).
- Rosa. Nikita. 2023. World Trade Organization: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsi. Retrieved from: detikEdu, 13 Jan 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6512844/world-trade-organization-pengertian-sejarah-tujuan-dan-fungsi>.
- UU-RI. 1994. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1994/7Tahun~1994UU.htm>
- Yazid, M.N. 2020. The international economic situation during the period before and After World War II: an analysis. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 21(3). Retrived from: https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2020/07/IJBEL21_072.pdf
- Yazid, M.N. 2015. The Theory of Hegemonic Stability, Hegemonic Power and International Political Economic Stability. *Global Journal of Political Science and Administration*, 3 (6), 67-79.
- Yazid, M.N. 2007. *Hegemonic Powers, Radical Politics & Developmental State: The Case of Indonesia-Malaysia Politcal Relations during the Cold War*. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah Press.

BIODATA PENULIS



Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, ST., SE., MSi., MSE.

Pendidikan menengah diterima penulis dari SMA Kolese Kanisius Jakarta, dilanjutkan dengan menempuh pendidikan tinggi S1 di Institut Teknologi Bandung Program Studi Teknik Sipil dengan Konsentrasi Manajemen Proyek yang lulus pada tahun 1997. Penulis juga menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjadjaran pada jurusan Manajemen yang lulus pada tahun 1998. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 di Prodi Ilmu Manajemen (lulus tahun 2003) dan Prodi Ilmu Ekonomi (lulus tahun 2007) Universitas Indonesia. Program Doktorat di bidang ilmu ekonomi, penulis selesaikan pada tahun 2012 di Universitas Indonesia. Penulis memiliki kompetensi di bidang Ekonomi dan Manajemen. Karir penulis adalah sebagai dosen profesional di berbagai universitas, seperti Universitas Kristen Indonesia, Universitas Pertahanan, Telkom University dan Universitas Maranatha Bandung. Penulis pun aktif sebagai peneliti yang didanai baik oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikbudristek.
Email Penulis: posmahutasoit@gmail.com